

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DALAM HUKUM INTERNASIONAL

(SUATU TINJAUAN TERHADAP FORUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL NON LITIGASI)

Oleh:

Benny Asrianto¹ dan Oksep Adhayanto²

Abstract

Settlement of disputes in international trade law in principle is known in legal dispute resolution (International). The forum is negotiation, investigation of the facts (inquiry), mediation, conciliation, arbitration, settlement through law or through the courts, or in ways other dispute resolution selected and agreed upon by the parties.

Keywords: *Dispute Resolution, International Law, Non-Litigation*

A. Pendahuluan

Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, maka masyarakat internasional terbagi dalam negara-negara berkembang dan negara-negara maju³.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengatur⁴.

Kemakmuran rakyat merupakan tujuan pembangunan, dan untuk mencapainya pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Seperti yang dikemukakan J.D Ny Hart⁵, bahwa "*Economic Development is The Result of All The Forces and Energies in a Country Which Collectively its per Capita*", artinya pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari seluruh kekuatan dan tenaga dari suatu Negara yang secara kolektif dapat meningkatkan pendapatan perkapita.

Antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat hubungan yang sangat erat dan saling

mempengaruhi. Pada satu pihak pembaharuan dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar sistem hukum yang bersangkutan. Penegakkan prinsip hukum yang baik juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya penegakkan Prinsip hukum yang tidak baik justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan⁶.

Menghadapi perkembangan dunia sekarang ini yang mengarah pada perubahan yang melintasi batas teritorial Negara, akan terlihat bahwa kaedah hukum juga harus berubah. Globalisasi yang melanda dunia baik *industrialized* maupun *developing countries* merupakan kemajuan dunia teknologi yang perlu diimbangi dengan aturan yang mampu mengayomi akibat globalisasi itu⁷ sehingga kurang tepat kalau sikap bersikeras dengan memegang teguh kaedah hukum yang ada untuk dipertahankan sedangkan masalah yang dihadapi telah berkembang meminta pengelolaan yang berubah pula⁸.

Transaksi-transaksi atau hubungan dagang banyak bentuknya, dari berupa hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa berdasarkan suatu kontrak, dan lain-lain.

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

² Dosen FISP UMRAH Tanjungpinang

³ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai; Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002

⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2006

⁵ Bandingkan, J.D Ny Hart, *The Rule Of Law In Economic Development* dalam Erman Rajagukguk, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi 2*, FH UI Program Pasca Sarjana, 2000.hlm.61, lihat juga dalam Zulherman Idris, *Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Oktober, 2002.h.310

⁶ CFG Sunaryati Hartono, Op cit. Lihat juga Zulherman Idris, *Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, Oktober, 2002, h. 311

⁷ Syafrinaldi, *Globalisasi Hukum*, Riau Pos, Rabu, 26 Juli 2000

⁸ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1984

Semua transaksi tersebut sarat dengan potensi melahirkan sengketa.

Karena umumnya dalam perdagangan internasional melibatkan 2 (dua) negara dimana hukum dari negara-negara tersebut saling berbeda satu sama lainnya, maka benturan-benturan hukum antarnegara yang terlibat tidak dapat dihindari.

Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase⁹.

Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase¹⁰.

Dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut diletakkan, baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul.

Biasanya pula kelalaian para pihak untuk menentukan forum ini akan berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian sengketa karena dengan adanya kekosongan pilihan forum tersebut akan menjadi alasan yang kuat bagi setiap forum untuk menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa suatu sengketa.

Lazimnya dalam sistem hukum (*Common Law*) dikenal dengan konsep *long arm jurisdiction*. Dengan konsep ini, pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali. Misalnya, badan peradilan di Amerika Serikat dan Inggris kerap kali selalu menerima sengketa yang para pihak serahkan ke hadapannya meskipun hubungan atau keterkaitan sengketa dengan badan peradilan sangatlah kecil. Misalnya, pihak termohon memiliki usaha di Amerika Serikat atau dalam kontrak tersebut secara tegas atau diam-diam mengacu kepada salah satu negara bagian Amerika Serikat atau hukum Inggris¹¹.

Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketa kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pengaturan alternatif di sini dapat berupa cara alternatif di samping pengadilan. Bisa juga berarti alternatif penyelesaian secara umum, yaitu berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang para pihak dapat gunakan, termasuk alternatif penyelesaian melalui pengadilan.

Biasanya pula dalam klausul tersebut dimasukkan atau dinyatakan pula hukum yang akan diterapkan oleh badan penyelesaian sengketa.

Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa.

Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi, prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati.

Termasuk dalam lingkup pengertian kesepakatan ini adalah:

1. bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya;
2. bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak¹².

2. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan

⁹ Gerald Cooke, *Disputes Resolution in International Trading*, in Jonathan Reuvid, *The Strategic to International Trade*, London, Kogan Page, 1997

¹⁰ Pada umumnya di samping menyepakati lembaga atau forum yang akan menyelesaikan sengketa, para pihak perlu juga menyepakati hukum apa yang akan diterapkan oleh badan peradilan yang baru disepakati para pihak. (Gerald Cooke, *op. at.*, h. 193).

¹¹ Gerald Cooke, *op. at.*, h.194

¹² Pasal 1338 KUH Perdata Indonesia

memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan (*principle of free choice of means*)¹³.

Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 7 *The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan sengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya¹⁴.

3. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum

Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (*arbitrase*) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*)¹⁵.

Prinsip yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Contoh kebebasan memilih ini yang harus dihormati oleh badan peradilan adalah Pasal 28 ayat (1) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* adalah sebagai berikut.

The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute, any designation of the law or legal system of a given state shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that state and not to its conflict of laws rules

4. Prinsip Iktikad Baik (Good Faith)

Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. *Pertama*, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara.

Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

5. Prinsip Exhaustion of Local Remedies

Prinsip *Exhaustion of Local Remedies* sebenarnya semula lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Dalam upayanya merumuskan pengaturan mengenai prinsip ini, Komisi Hukum Internasional PBB (*International Law Commission*) memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam pasal 22 mengenai *ILC Draft Articles on State Responsibility*. Pasal 22 ini menyatakan sebagai berikut.

*When the conduct of a state has created a situation not in conformity with the result of it by an international obligation concerning the treatment to be accorded to aliens, whether natural or juridical persons, but the obligation allows that this or an equivalent result may nevertheless be achieved by subsequent conduct of the state, there is a breach of the obligation only if the aliens concerned have exhausted the effective local remedies available to them without obtaining the treatment called for by the obligation or, where that is not possible, an equivalent treatment*¹⁶

Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Dalam sengketa *the Interhandel Case* (1959), Mahkamah Internasional menegaskan:

¹³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2006

¹⁴ Pasal 7 *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*: ' *Arbitration Agreement* is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement

¹⁵ Pasal 38:2 Statuta Mahkamah Internasional: *This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree hereon.*

¹⁶ Terkutip. dari D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 5.ed., 1998, h.617.

*Before resort may be had to an international court... the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.*¹⁷

B. Permasalahan

Selanjutnya yang menjadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam hukum internasional (*suatu tinjauan terhadap forum penyelesaian sengketa internasional*) ?

C. Pembahasan

Kemajuan suatu bangsa mempunyai keterkaitan yang erat sekali dengan situasi bagaimana suatu bangsa itu bisa mengambil manfaat dari lajunya globalisasi itu. Era globalisasi itu dimulai dengan bangkitnya teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam menyikapi kenyataan ini potensial kekayaan alam (*natural resources*) suatu bangsa tidak dapat lagi mengantarkan bangsa itu menjadi *welfare state*. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki atau sedikit memiliki *natural resources* tersebut justru dapat mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya¹⁸.

Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak¹⁹.

Cara-cara sengketa di atas telah dikenal dalam berbagai negara dan sistem hukum di dunia. Cara-cara tersebut dipandang sebagai bagian integral dari penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukumnya. Misalnya, hukum nasional RI yang dapat ditemukan dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Negara lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

Berikut adalah uraian singkat mengenai forum-forum

tersebut. Tidak semua forum dibahas, tetapi akan dibatasi pada negosiasi, mediasi, konsiliasi, pengadilan dan arbitrase. Sementara itu, penyelidikan fakta (*inquiry*) atau cara-cara lainnya yang para pihak sepakat tidak termasuk dalam bahasan.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik.

Menurut Munir, Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak²⁰.

Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.

Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah pertama, ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap kali terjadi ketika dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka²¹.

Kelemahan kedua adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antara para pihak. Selain itu, jarang sekali ada persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi ini²².

Kelemahan ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif²³.

Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur-prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut. Pertama, negosiasi digunakan ketika

¹⁷ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002

¹⁸ Syafrinaldi, *Kesepakatan ASEAN 1995 Dan Hak Milik Intelektual*, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, April 2003

¹⁹ Cf., Pasal 33 Piagam PBB: *The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or Other peaceful means of their own choice*

²⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

²¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Op.Cit. h.201

²² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Op.Cit. h.202

²³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Op.Cit. h.202

suatu sengketa belum lahir (di sebut pula sebagai konsultasi); dan kedua, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa telah lahir, prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia, dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

Menurut Munir, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga ini disebut dengan mediator²⁴.

Usul-usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat agak tidak resmi (informal). Usulan ini dibuat berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh para pihak, bukan atas penyelidikannya.

Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Hal yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usul-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator.

Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan atau arbitrase.

3. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk

menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya acap kali digunakan dengan bergantian.

Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

Contoh komisi konsiliasi yang terlembaga adalah badan yang dibentuk oleh Bank Dunia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa penanaman modal asing, yaitu the *ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules)* Namun dalam praktiknya, penggunaan cara ini kurang populer.

Sejak berdiri (1966), badan konsiliasi ICSID hanya menerima dua kasus. Kasus pertama diterima pada 5 Oktober 1982. (Jadi selama 16 tahun kosong). Namun, sebelum badan konsiliasi terbentuk, para pihak sepakat mengakhiri persengketaannya.

Kasus kedua, yaitu *Tesoro Petroleum Corp. v. Government of Trinidad and Tobago* diterima tahun 1983.³² Kasus ini berhasil diselesaikan pada tahun 1985 setelah para pihak sepakat untuk menerima usulan-usulan yang diberikan oleh konsiliator²⁵.

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah berkiprah. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar

²⁴ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis....h.314

²⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Op.Cit. h.206

ditembusi oleh para *justitiablen* (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis, dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Maka mulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah lewat badan arbitrase²⁶.

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.

Menurut Munir, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana penyelesaian sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut²⁷. Sedangkan arbitrase internasional adalah arbitrase lembaga maupun arbitrase *ad-hoc*, yang melibatkan pihak dari 2 negara yang berbeda²⁸.

Adapun alasan utama mengapa badan arbitrase ini semakin banyak dimanfaatkan adalah sebagai berikut.

- a. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang pertama dan terpenting adalah penyelesaiannya yang relatif lebih cepat daripada proses berperkara melalui pengadilan. Dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali seperti yang kita kenal dalam sistem peradilan kita. Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat. Kecepatan penyelesaian ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha.
- b. Keuntungan lainnya dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah sifat kerahasiaannya, baik kerahasiaan mengenai persidangannya maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya.
- c. Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih 'hakimnya' (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau

spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbiter yang dipilih adalah mereka yang tidak saja ahli, tetapi juga ia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa insinyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain.

- d. Keuntungan lainnya dari badan arbitrase ini adalah dimungkinkannya para arbiter untuk menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakan dan kepatutan (apabila memang para pihak menghendakinya).
- e. Dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan. Hal ini dapat terwujud antara lain karena dalam lingkup arbitrase internasional ada perjanjian khusus mengenai hal ini, yaitu Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing²⁹

D. Kesimpulan

Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak

Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.

Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase

²⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*h.311

²⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum*....h. 311-312

²⁸ *Ibid*

²⁹ Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981

DAFTAR PUSTAKA

- Gerald Cooke, ***Disputes Resolution in International Trading***, in Jonathan Reuvid, *The Strategic to International Trade*, London, Kogan Page, 1997
- Hikmahanto Juwana, ***Bunga Rampai; Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional***, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Huala Adolf, ***Hukum Perdagangan Internasional***, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- _____, ***Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional***, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- H.J. Harris, ***Cases and Materials on International law***, London: Sweet and Maxwell, 5.ed., 1998
- J.D Ny Hart, ***The Rule Of Law In Economic Development*** dalam Erman Rajagukguk, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi 2*, FH UI Program Pasca Sarjana, 2000
- Munir Fuady, ***Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Syafrinaldi, ***Globalisasi Hukum***, Riau Pos, Rabu, 26 Juli 2000
- Sumantoro, ***Hukum Ekonomi***, UI Press, Jakarta, 1984
- Syafrinaldi, ***Kesepakatan ASEAN 1995 Dan Hak Milik Intelektual***, Jurnal Mahkamah, Pekanbaru, April 2003
- Zaeni Asyhadie, ***Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia***, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Zulherman Idris, ***Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia***, Jurnal Mahkamah, Oktober, 2002